



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 107 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN SINGAJAYA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Singajaya Tahun 2022;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Singajaya Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SINGAJAYA TAHUN 2022.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II**

**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

**Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**NURDINYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 107**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 107 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
KECAMATAN SINGAJAYA  
TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

**P**erencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Kecamatan Singajaya sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Singajaya telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Singajaya tahun 2022 dengan Tema Pembangunan Tahun 2022 berdasarkan RKPD Tahun 2022 yaitu **“Percepatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan masyarakat”**.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45 );
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15 );
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E );
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14 );
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34 );
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
  21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
  22. Peratutan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  23. Peratutan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
  24. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11 );
  25. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
  26. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
  27. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.
  28. Keputusan Camat Singajaya Nomor : ..... tentang Review Rencana Strategis Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
  29. Keputusan Bupati Garut Nomor : ..... tentang Rencana Kerja Kecamatan Singajaya Tahun 2022

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Singajaya tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Singajaya guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan

serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Singajaya tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Singajaya;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Singajaya Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

#### **BAB I Pendahuluan**

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Singajaya Tahun 2022**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Singajaya Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;  
Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Singajaya tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Singajaya sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Singajaya berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Singajaya tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Singajaya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Singajaya;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Singajaya, dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review terhadap RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut;

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah

Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Singajaya.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

## **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal

dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SINGAJAYA**  
**TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD**

**R**encana Kerja Kecamatan Singajaya merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Singajaya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Singajaya ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Singajaya selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Singajaya Tahun 2021 antara lain :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Dengan Sub. Kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Dengan Sub. Kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Dengan Sub Kegiatan :
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Dengan Sub. Kegiatan :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Dengan Sub. Kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Mebel
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Dengan Sub. Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Dengan Sub. Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Dengan Sub Kegiatan :
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Dengan Sub. Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### **3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yaitu :

#### 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dengan Sub. Kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

#### 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Dengan Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

### **4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :

#### 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dengan Sub. Kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

### **5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :

#### 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dengan Sub. Kegiatan :

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

### **6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

#### 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Singajaya 2022 masih berjalan. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dan masih berjalan dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

#### **A. Capaian Program/Kegiatan Renja 2021**

- 1) Capaian Realisasi program/kegiatan/Sub. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Singajaya dalam pelaksanaan Renja 2021 terdapat beberapa Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran telah memenuhi target, antara lain :

##### **a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH prosentase Realisasi Keuangan 56.10 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 8.610.000
2. EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 3.704.000 terealisasi Rp. 3.704.000
3. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN prosentase realisasi keuangan 51.02 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 1.390.949.087 terealisasi Rp. 709.659.772
4. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUTKELENGKAPANNYA prosentase realisasi keuangan 0 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 11.444.400 terealisasi Rp. 0
5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKANTUGAS DAN FUNGSI prosentase realisasi keuangan 0 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 22.194.000 terealisasi Rp. 0
6. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR prosentase realisasi keuangan 50.72 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 7.374.100, terealisasi Rp. 3.740.000
7. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR prosentase realisasi keuangan 16.22 % dengan pagu anggaran

- tahun 2021 Rp. 150.272.120 terealisasi Rp. 24.377.800,
8. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA prosentase realisasi keuangan 82.56 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 16.791.400 terealisasi Rp 13.862.400.
  9. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN prosentase realisasi keuangan 37.09 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 13.229.200 terealisasi Rp 4.907.300
  10. FASILITASI KUNJUNGAN TAMU prosentase realisasi keuangan 37.12 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 39.600.000 terealisasi Rp 14.700.000
  11. PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD prosentase realisasi keuangan 34.22 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 54.500.000 terealisasi Rp 18.650.000
  12. PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN prosentase realisasi keuangan 68.24 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 74.734.000, terealisasi Rp 51.000.000
  13. PENGADAAN MEBEL prosentase realisasi keuangan 99.29 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 67.449.300 terealisasi Rp 66.971.500
  14. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK prosentase realisasi keuangan 39.97 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 6.403.680 terealisasi Rp 2.559.366
  15. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR prosentase realisasi keuangan 33.72 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 4.300.000 terealisasi Rp 1.450.000
  16. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR prosentase realisasi keuangan 51.22 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 17.705.200 terealisasi Rp 9.068.000
  17. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN realisasi keuangan 1.51 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 29.391.700 terealisasi Rp 444.400
  18. PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA realisasi keuangan 0 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 89.201.200 terealisasi Rp 0

**b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

1. PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN realisasi keuangan 20.82 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 188.616.200 terealisasi Rp 39.272.000
2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN realisasi keuangan 49.66 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 36.550.000 terealisasi Rp 18.150.000

**c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

1. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 20.000.000 terealisasi Rp 20.000.000
2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN realisasi keuangan 46.52 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 13.574.000 terealisasi Rp 6.314.000
3. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN realisasi keuangan 31.50 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 38.416.600 terealisasi Rp 12.100.400

**d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN realisasi keuangan 48.90 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 79.710.000 terealisasi Rp 38.980.000

**e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

1. PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN realisasi keuangan 27.91 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 200.000.100 terealisasi Rp 55.816.000

**f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

1. FASILITASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 5.927.300 terealisasi Rp 5.927.300

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

NO	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Tahun 2021			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
<b>1.</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	-	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	<b>3.704.000</b>	<b>3.704.000</b>	<b>100</b>
	b.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>74.734.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>68.24</b>
	c.	PENGADAAN MEBEL	<b>67.449.300</b>	<b>66.971.500</b>	<b>99.29</b>
<b>2.</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	-	Fasilitasi Penerapan Dan Penegakan Peraturanperundang-Undangan	<b>5.927.300</b>	<b>5.927.300</b>	<b>100</b>

- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Singajaya adalah sebagai berikut :

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Singajaya tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Singajaya pada umumnya.

2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Singajaya berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Singajaya.
- 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
  - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

## **B. Evaluasi Capaian Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Tahun 2021**

Renstra SKPD Kecamatan Singajaya merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Singajaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Singajaya yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	85	82	97.64	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4				
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>82</b>	<b>97.64</b>	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4				

	Pemerintahan					<b>Kondisi Akhir (F)</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1			
						Triwulan 2	BB	CC	53.16
						Triwulan 3			
						Triwulan 4			
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		CC	<b>53.16</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 indikator kinerja Kecamatan Singajaya tahun 2021, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% Tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2014-2019 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Singajaya. Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2014-2019 sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-20124 disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat terkait pandemi Covid 19.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Singajaya selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.3**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021  
Kabupaten Garut**

Nama SKPD : Kecamatan Singajaya

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2019 (%)	Realisasi Renja SKPD tahun 2019 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7		Urusan Wajib									
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan									
7	01	35	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %					
7	01	35	01	002	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	27,35	100 %	27,35	27,35
7	01	35	01	008	Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	100 %	70,84	100 %	70,84	100 %
7	01	35	01	009	Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kerja yang baik	100 %	51,27	100 %	51,27	100
7	01	35	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100 %	51,27	100 %	51,27	100
7	01	35	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	100 %	37,96	100	37,96	100
7	01	35	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan peralatan listrik lainnya	100 %	100	100	100	100
7	01	35	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	0	100 %	0	100 %
7	01	35	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat	100 %	40,00	100	40,00	100
7	01	35	01	021	Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan	100 %	52,62	100 %	52,62	100 %



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Singajaya sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut

Tabel 2.2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proye ksi Tahu n 2022	Cat ata n Ana lisis
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai survey kepuasan masyarakat			n/a	n/a	82	83	84	n/a	n/a	82	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			n/a	n/a	85	87	89	n/a	n/a	85	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			n/a	n/a	80	90	100	n/a	n/a	80	
4	Predikat SAKIP			n/a	n/a	85	95	100	n/a	n/a	85	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Singajaya bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

#### 1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### 2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha



untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) **Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

## **2.4 Review terhadap RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Singajaya serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Singajaya berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Singajaya.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Singajaya sebelum perubahan sebesar Rp. 2.592.037.587,- .

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Singajaya diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Singajaya mengusulkan 6 (enam) Program dengan 14 (empat Belas ) kegiatan dan 27 ( Dua Puluh tujuh ) Sub. Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Singajaya mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4.1 sebagai berikut :

Tabel 2.4.1  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Singajaya

Lembar 1 dari 7

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kecamatan Singajaya</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2.009.243.387</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kecamatan Singajaya</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2.009.243.387</b>	
<b>1</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	13.704.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	13.704.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	10.000.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	3.704.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	3.704.000	
<b>2</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	1.390.949.087	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	1.390.949.087	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1.390.949.087	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1.390.949.087	

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	33.638.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	33.638.400
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya		Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21 Stel	11.444.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya		Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21 Stel	11.444.400
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	22.194.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	22.194.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 laporan	281.766.820	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 laporan	281.766.820
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 ITEM	7.374.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 ITEM	7.374.100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor	4 Jenis	150.272.120	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor	4 Jenis	150.272.120
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	9 ITEM	16.791.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	9 ITEM	16.791.400
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	13.229.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	13.229.200
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	100 Kali	39.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	100 Kali	39.600.000

	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	54.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	54.500.000	
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	142.183.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	142.183.300	
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	74.734.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	74.734.000	
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel	7 item	67.449.300	Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel	7 item	67.449.300	
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	28.408.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	28.408.880	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	6.403.680	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	6.403.680	
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	4 Jenis	4.300.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	4 Jenis	4.300.000	
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	4 jenis	17.705.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	4 jenis	17.705.200	
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	118.592.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	118.592.900	

	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	8 unit	29.391.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	8 unit	29.391.700	
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara	1 gedung	89.201.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara	1 gedung	89.201.200	
<b>II</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>175.166.200</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>175.166.200</b>	
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	138.616.200	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	138.616.200	
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	138.616.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	138.616.200	
	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 laporan	36.550.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 laporan	36.550.000	
	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	9 jenis	36.550.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	9 jenis	36.550.000	
<b>III</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>71.990.600</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>71.990.600</b>	

1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 laporan	33.574.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 laporan	33.574.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Dokumen RPTK	1 dokumen	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Dokumen RPTK	1 dokumen	20.000.000
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Lomba Desa )	9 desa	13.574.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Lomba Desa )	9 desa	13.574.000
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 laporan	38.416.600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 laporan	38.416.600
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	260 orang	38.416.600	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	260 orang	38.416.600
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>129.710.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>129.710.000</b>
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	129.710.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	129.710.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Anggota Satpol PP	5 orang	79.710.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Anggota Satpol PP	5 orang	79.710.000

	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah cabang/golongan yang di ikuti	8 Cabang/Golongan	50.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah cabang/golongan yang di ikuti	8 Cabang/Golongan	50.000.000	
<b>V</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.100</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.100</b>	
<b>1</b>		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 laporan	200.000.100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 laporan	200.000.100	
	1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 kali	200.000.100	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 kali	200.000.100	
<b>VI</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>5.927.300</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>5.927.300</b>	
<b>1</b>		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 laporan	5.927.300	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 laporan	5.927.300	
	1	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Razia	12 Bulan	5.927.300,00	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Razia	12 Bulan	5.927.300	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Singajaya melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Singajaya mengacu kepada Program Prioritas Daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5.1  
T-C.32  
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD  
Kecamatan Singajaya  
Kabupaten Garut

Tabel 2.5.1  
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD  
Kecamatan Singajaya  
Kabupaten Garut

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	KETERANGAN
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )
1	Dinas Pendidikan	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD	Pembangunan Gedung PAUD	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ), Singajaya)	18 Unit	1.800.000.000,00	
2	Dinas Kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pembentukan Kecamatan Sehat	Pembangunan Posyandu	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ), Singajaya)	18 Unit	1.800.000.000,00	
3	Dinas Kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mobile Ambulance	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ), Singajaya)	9 Unit	1.800.000.000,00	
4	Dinas Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Fasilitas Kesehatan	Pembangunan/ rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya.	Pembangunan Poskesdes	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ), Singajaya)	9 Unit	1.800.000.000,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Peningkatan Jalan Kabupaten	Peningkatan Jalan Kabupaten ( Singajaya-Taraju )	(Kecamatan Singajaya ( Desa Cigitung, Desa Sukawangi ), Singajaya)	5 M	2.500.000.000,00	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan jembatan Desa	Peningkatan/Pembangunan Saluran /Drainase/Gorong-gorong Jalan Desa	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Raya	(Kecamatan Singajaya ( Desa Singajaya ), Singajaya)	200 M	250.000.000,00	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	9 Unit	1.500.000.000,00	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK FISIK - PENUGASAN)	Pembangunan Jalan Usaha Tani	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ), Singajaya)	9 Unit	180.000.000,00	
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Peningkatan/Pembangunan Embung	Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) /Tanggul Daerah Irigasi Sindujaya HM 20	(Kecamatan Singajaya ( Desa Sukamulya ), Singajaya)	200 M	250.000.000,00	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Peningkatan/Pembangunan Embung	Pembangunan Damparit	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	9 Unit	180.000.000,00	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Peningkatan/Pembangunan TPT/Kirmir Lingkungan	Pembangunan Tembok Penahan Tebing/TPT	(Desa Singajaya/Puskesmas Singajaya, Singajaya)	20 M	50.000.000,00	

12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (DAK FISIK - REGULER)	Pembangunan IPAL	(Puskesmas Singajaya, Singajaya)	1 Unit	220.000.000,00	
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Pembangunan Gapura Batas Kecamatan	(Kecamatan Singajaya ( Batas Singajaya-Banjarwangi dan Singajaya -Kab. Tasikmalaya ), Singajaya)	2 Unit	100.000.000,00	
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum	Perencanaan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan kantor Dinas UPT PUPR	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	1 Unit	750.000.000,00	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum	Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi Gedung Pemerintah	Pembangunan Kantor Kecamatan	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	1 Unit	2.000.000.000,00	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Umum	Pembangunan Masjid	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ), Singajaya)	18 Unit	1.800.000.000,00	
17	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Perumahan	Pembangunan Jalan Lingkungan	(Kp. Maungnyangsang Desa Girimukti, Singajaya)	100 M	150.000.000,00	
18	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Monitoring Pengadaan Tanah	Pembangunan Tempat Parkir / Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Parkir	(Desa Singajaya/Puskesmas Singajaya, Singajaya)	100 M	50.000.000,00	
19	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Linmas dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Palatihan LINMAS	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	90 Orang	450.000.000,00	
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Penanggulangan Bencana	(Desa Sukawangi, Singajaya)	1 Paket	50.000.000,00	
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Peningkatan Kapasitas Kelompok Menjahit	(Kecamatan Singajaya ( 4 Desa ), Singajaya)	200 Orang	150.000.000,00	
22	Dinas Ketahanan Pangan	Program Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Strategis	Kegiatan Pemantauan dan Analisis harga Pangan Pokok Strategis	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	1 Paket	50.000.000,00	
23	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Kualitas dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	(Desa Pancasura, Singajaya)	1 Paket	75.000.000,00	
24	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Keamanan Pangan	Pemantauan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	1 Paket	50.000.000,00	
25	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Taman Kota	Penataan Halaman/Ruang Terbuka Hijau	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	1 Unit	250.000.000,00	
26	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Areal Pemakaman Umum	Penataan TPU	Pemeliharaan / Penataan TPU	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ), Singajaya)	9 Unit	500.000.000,00	

27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Penguatan Manajemen dan Kemampuan Kelembagaan Bumdes	Pelatihan BUMDes	(Kecamatan Singajaya ( Desa Singajaya, Ciudian,Pancasura,Girimukti ) , Singajaya)	20 Orang	100.000.000,00	
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kel	Insentif Guru Ngaji	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ), Singajaya)	360 Orang	648.000.000,00	
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Peningkatan kapasitas kader posyandu	Insentif Kader Desa Wisma	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ) , Singajaya)	650 Orang	390.000.000,00	
30	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Ketahanan Keluarga	Kampung Keluarga Berencana	Pembangunan Balle Sawala ( Kampung KB )	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ), Singajaya)	9 Unit	1.800.000.000,00	
31	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Program Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pencasilat Paguron	Pengadaan Alat Olah Raga Pencak Silat	(Kecamatan Singajaya ( Desa Sukawangi dan Desa Girimukti ), Singajaya)	2 Paket	150.000.000,00	
32	Dinas Perikanan dan Peternakan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pengembangan sarana Balai Benih ikan (BBI)	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ) , Singajaya)	9 Kelompok	300.000.000,00	
33	Dinas Perikanan dan Peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	Pengembangan Ternak Domba	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ) , Singajaya)	90 Kelompok	900.000.000,00	
34	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	Helaran Budaya Komunitas Adat (HJG)	Pengadaan Alat Musik Marawis	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ), Singajaya)	9 Unit	135.000.000,00	
35	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Tanaman Pangan Berkelanjutan	Pengelolaan lahan balai benih pembantu tanaman pangan	Pengembangan Tanaman Alpuket	(Kecamatan Singajaya ( desa Cigitung, Ciudian, Mekartani, Singajaya ) ,Singajaya)	100 Ha	650.000.000,00	
36	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Tanaman Pangan Berkelanjutan	Pengelolaan lahan balai benih pembantu tanaman pangan	Pengembangan Bibit Vanili	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	10 Ha	500.000.000,00	
37	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Tanaman Pangan Berkelanjutan	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman	Pengembangan Jahe	(Kecamatan Singajaya ( 4 desa ), Singajaya)	10 Ha	500.000.000,00	
38	Dinas Pertanian	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan Alat Pertanian / Sarana dan Prasarana Pertanian	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ) , Singajaya)	9 Paket	350.000.000,00	
39	Dinas Pertanian	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan ALSINTAN	(Kecamatan Singajaya ( 9 Desa ), Singajaya)	9 Unit	180.000.000,00	
40	Dinas Pertanian	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	9 Unit	300.000.000,00	

41	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan Berkelanjutan	Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Teh	Rehabilitasi Tanaman Teh	(Kecamatan Singajaya ( Desa, Pancasura, Sukamulya, girimukti, Mekartani ) , Singajaya)	150 Ha	2.600.000.000,00	
42	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan Berkelanjutan	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Perkebunan	Pengembangan Sereh Wangi	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	200 Ha	500.000.000,00	
43	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan Berkelanjutan	Pengendalian OPT dan Dampak Iklim Pada Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	Pengembangan Tanaman Jahe	(Kecamatan Singajaya ( Desa Mekartani, Sukamulya, Cigitung ) ,Singajaya)	30 Ha	150.000.000,00	
44	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan Berkelanjutan	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Intensifikasi Th	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	200 Ha	2.000.000.000,00	
45	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan Berkelanjutan	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Rehabilitasi Teh	(Kecamatan Singajaya, Singajaya)	100 Ha	1.700.000.000,00	
46	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan Berkelanjutan	Fasilitasi Peningkatan Mutu Hasil Produksi Perkebunan	Pengembangan Tanaman Vanili	(Kecamatan Singajaya ( Desa Singajaya, Sukawang, Sukamulya dan Karangagung ) , Singajaya)	5 Ha	400.000.000,00	
	<b>JUMLAH</b>						<b>33.008.000.000,00</b>	

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut.**

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Singajaya guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Singajaya di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Singajaya yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Singajaya telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Singajaya mempunyai **tujuan** :

- 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik**
- 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tk. Kecamatan**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Singajaya Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Singajaya Tahun 2022 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Predikat SAKIP

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Singajaya Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan**  
**Singajaya**  
**Tahun 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGE
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tk. Kecamatan	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	85
		2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	80
		3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat SAKIP	85

### 3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Singajaya merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Singajaya sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Singajaya diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Singajaya merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Singajaya diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya



akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Singajaya. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Singajaya diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Singajaya sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Singajaya melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program, Jumlah Kegiatan dan Jumlah Sub. Kegiatan.

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Singajaya Tahun 2022 adalah 6 ( Enam ) Program, 14 ( Empat Belas ) Kegiatan dan 27 ( Dua Puluh Tujuh ) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Singajaya sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Singajaya dan mencakup semua Desa.

5. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar **Rp. 2,521,764,574,-**.

Adapun Program Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Singajaya pada Tahun 2022 adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Mebel
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Dengan Sub Kegiatan :
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan  
Dengan Sub Kegiatan :
  - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.  
Dengan Sub Kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  
Dengan Sub Kegiatan :
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

#### IV. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT DESA

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Desa yaitu :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN).  
Dengan Sub Kegiatan :
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

#### V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Dengan Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

#### VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.  
Dengan Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Tabel berikut ini :

Tabel 3.3.1  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Garut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat	Rencana Tahun 2022					Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
			Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja	Target			
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	1		<b>KECAMATAN</b>					5,708,364,507			6,279,200,958				
7	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					4,964,033,407			5,460,436,748				
7	1	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					55,006,220			60,506,842			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	1 dokumen	85 nilai	11,201,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	12,321,100
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	1 dokumen	85 nilai	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	11,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	1 dokumen	85 nilai	4,999,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	5,498,900
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	1 dokumen	85 nilai	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	5,500,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	1 dokumen	85 nilai	5,690,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	6,259,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	1 laporan	85 nilai	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	11,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	1 laporan	85 nilai	8,116,220	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	8,927,842

<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>1,410,949,087</b>				<b>1,552,043,996</b>		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100,00 %	14 bulan	85 nilai	1,390,949,087	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00 %	1,530,043,996
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100,00 %	1 laporan	85 nilai	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00 %	11,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100,00 %	1 laporan	85 nilai	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00 %	11,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>5,000,000</b>				<b>5,500,000</b>		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100,00 %	1 laporan	85 Nilai	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00 %	5,500,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>93,114,400</b>				<b>102,425,840</b>		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100,00 %	21 stel	85 nilai	11,444,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100,00 %	12,588,840
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100,00 %	21 orang	85 nilai	81,670,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100,00 %	89,837,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>317,186,420</b>				<b>348,905,062</b>		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	10 item	85 nilai	10,243,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	11,267,300
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	4 jenis	85 nilai	160,272,120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	176,299,332
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	9 item	85 nilai	16,791,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	18,470,540
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	10 jenis	85 nilai	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	-
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	2 jenis	85 nilai	13,229,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	14,552,340
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	4 exemplar	85 nilai	2,050,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,255,550

7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 kali	85 nilai	60,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	66,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	12 bulan	85 nilai	54,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,060,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>2,773,564,900</b>				<b>3,050,921,390</b>
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dalam kondisi baik	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	75 %	2 unit	85 nilai	111,176,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Aset dalam kondisi baik	75 %	122,293,600
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Aset dalam kondisi baik	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	75 %	7 item	85 nilai	112,388,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Aset dalam kondisi baik	75 %	123,627,790
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dalam kondisi baik	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	75 %	2 jenis	85 nilai	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Aset dalam kondisi baik	75 %	55,000,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dalam kondisi baik	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	75 %	1 gedung	85 nilai	2,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Aset dalam kondisi baik	75 %	2,750,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>29,820,680</b>				<b>32,802,748</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	75 %	12 bulan	85 Nilai	6,403,680	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	75 %	7,044,048
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	75 %	4 jenis	85 Nilai	5,760,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	75 %	6,336,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	75 %	4 jenis	85 Nilai	17,657,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	75 %	19,422,700
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>279,391,700</b>				<b>307,330,870</b>
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Persentase Aset dalam kondisi baik	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	75 %	10 unit	85 Nilai	29,391,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Aset dalam kondisi baik	75 %	32,330,870
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset dalam kondisi baik	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	75 %	1 gedung	85 Nilai	250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Aset dalam kondisi baik	75 %	275,000,000

7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>175,166,200</b>				<b>192,682,820</b>		
7	1	2	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>				<b>138,616,200</b>				<b>152,477,820</b>		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelengg	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	82 %	1 kegiatan	82 nilai	138,616,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelengg	82 %	152,477,820
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecar</b>				<b>36,550,000</b>					<b>40,205,000</b>	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase Fasilitasi Penyelengg	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	82 %	9 jenis	82 nilai	36,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	persentase Fasilitasi Penyelengg	82 %	40,205,000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>52,390,600</b>					<b>57,629,660</b>	
7	1	3	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				<b>31,854,000</b>					<b>35,039,400</b>	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	9 Kegiatan	80 %	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	16,500,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	1 laporan	80 %	16,854,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	18,539,400
7	1	3	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>20,536,600</b>					<b>22,590,260</b>	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	260 orang	85 nilai	20,536,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	22,590,260
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>157,687,300</b>					<b>173,456,030</b>	
7	1	4	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>				<b>7,927,300</b>					<b>8,720,030</b>	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	80 %	24 kali	85 Nilai	7,927,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	80 %	8,720,030
7	1	4	2.03		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>149,760,000</b>					<b>164,736,000</b>	
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	80 %	12 bulan	85 nilai	99,760,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	80 %	109,736,000
7	01	04	2.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	80 %	1 Kegiatan	85 nilai	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	80 %	55,000,000

7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>275,000,000</b>			<b>302,500,000</b>		
7	1	5	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>					<b>275,000,000</b>			<b>302,500,000</b>		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	90 %	4 kali	85 nilai	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	90 %	27,500,000
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat		90 %	4 Kali	85 nilai	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	90 %	55,000,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	90 %	12 bulan	85 nilai	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	90 %	220,000,000
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					<b>84,087,000</b>			<b>92,495,700</b>		
7	1	6	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>					<b>84,087,000</b>			<b>92,495,700</b>		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	85 %	9 desa	85 nilai	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	85 %	11,000,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	85 %	1 Kegiatan	85 nilai	25,477,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	85 %	28,024,700
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	85 %	1 Kegiatan	85 nilai	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	85 %	16,500,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	85 %	3 Kegiatan	85 nilai	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	85 %	16,500,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	85 %	1 Dokumen	85 nilai	18,610,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	85 %	20,471,000
<b>TOTAL</b>										<b>5,708,364,507</b>			<b>6,279,200,958</b>		

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja Kecamatan Singajaya Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 6 program, 15 Kegiatan Dan 32 Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut sebesar Rp. **2.521.764.574**, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp.</b>	<b>1,949,904,574</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>23,000,000</b>
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	10,000,000
	Capaian Program : Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu Dengan Target Kinerja 100 %		
	Masukan : Jumlah Dana Rp. 10,000,000		
	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan Pada Tahun 2022.		
	Hasil : Predikat SAKIP		
	Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya		
1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	13,000,000
	Capaian Program : Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu Dengan Target Kinerja 100 %		
	Masukan : Jumlah Dana Rp. 13,000,000		
	Keluaran : Jumlah laporan evaluasi kinerja kecamatan Pada Tahun 2022.		
	Hasil : Predikat SAKIP		
	Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya		
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</b>	<b>Rp.</b>	<b>1,420,490,574</b>
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	1,413,490,574
	Capaian Program : Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian		

	kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Dengan Target Kinerja 100 %		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 1,413,490,574		
Keluaran	: Jumlah Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	2,140,000
Capaian Program	: ersentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Dengan Target Kinerja 100 %		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 2,140,000.-		
Keluaran	: Jumlah laporan keuangan/triwulan/semesteran kecamatan		
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</b>	<b>Rp.</b>	<b>12.000.000</b>
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	12.000.000
Capaian Program	: Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Dengan Target Kinerja 100 %		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 12.000.0000 ,-		
Keluaran	: Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Untuk Keperluan Tahun 2022.		
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja		

Kecamatan

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya

- |   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| <b>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Rp.</b> | <b>191,478,620</b> |
| 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Rp.        | 5,025,480          |
| Capaian Program : Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor Dengan Target Kinerja 100 %                    |            |                    |
| Masukan : Jumlah Dana Rp. 5,025,480   |            |                    |
| Keluaran : Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pada Tahun 2022.            |            |                    |
| Hasil : Predikat SAKIP  |            |                    |
| Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya   |            |                    |
| 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Rp.        | 91,453,140         |
| Capaian Program : Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor Dengan Target Kinerja 100 %                    |            |                    |
| Masukan : Jumlah Dana Rp. 91,453,140,-  |            |                    |
| Keluaran : Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Untuk Tahun 2022.   |            |                    |
| Hasil : Predikat SAKIP  |            |                    |
| Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya   |            |                    |
| 4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Rp.        | 5,000,000          |
| Capaian Program : Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 100 % |            |                    |
| Masukan : Jumlah Dana Rp. 5,000,000,-   |            |                    |
| Keluaran : Jumlah item Peralatan Rumah Tangga Untuk Tahun 2022.   |            |                    |
| Hasil : Predikat SAKIP  |            |                    |
| Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya   |            |                    |
| 4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Rp.        | 15,000,000         |

	Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor Dengan Target Kinerja 100 %		
	Masukan	: Jumlah Dana Rp. 15,000,000,-		
	Keluaran	: Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Untuk Tahun 2022.		
	Hasil	: Predikat SAKIP		
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
4.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.	45,000,000
	Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor Dengan Target Kinerja 100 %		
	Masukan	: Jumlah Dana Rp. 45,000,000,-		
	Keluaran	: Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu untuk kebutuhan Tahun 2022.		
	Hasil	: Predikat SAKIP		
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.	30,000,000
	Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor Dengan Target Kinerja 100 %		
	Masukan	: Jumlah Dana Rp. 30,000,000,-		
	Keluaran	: Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu Untuk kebutuhan Tahun 2022.		
	Hasil	: Predikat SAKIP		
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Rp.</b>	<b>210,000,000</b>
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.	10,000,000
	Capaian Program	: Persentase Aset dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 75 %		
	Masukan	: Jumlah Dana Rp. 10,000,000,-		

	Keluaran	: Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya Untuk Kebutuhan Tahun 2022.		
	Hasil	: Predikat SAKIP		
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
5.2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Rp.	200,000,000
	Capaian Program	: Persentase Aset dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 75 %		
	Masukan	: Jumlah Dana Rp. 200,000,000,-		
	Keluaran	: Jumlah Lokasi Gedung Kantor Untuk Kebutuhan Tahun 2022.		
	Hasil	: Predikat SAKIP		
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Rp.</b>	<b>19,403,680</b>
6.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.	6,403,680
	Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor Dengan Target Kinerja 75 %		
	Masukan	: Jumlah Dana Rp. 6.403.680 ,-		
	Keluaran	: Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pada Tahun 2022.		
	Hasil	: Predikat SAKIP		
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
6.2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.	4,000,000
	Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor Dengan Target Kinerja 75 %		
	Masukan	: Jumlah Dana Rp. 4.000.000,-		
	Keluaran	: Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara Pada Tahun 2022.		

	Hasil	: Predikat SAKIP		
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.	9,000,000
	Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor Dengan Target Kinerja 75 %		
	Masukan	: Jumlah Dana Rp. 9,000,000,-		
	Keluaran	: Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor Pada Tahun 2022.		
	Hasil	: Predikat SAKIP		
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Rp.</b>	<b>78,391,700</b>
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.	29.391.700
	Capaian Program	: Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Target Kinerja 75 %		
	Masukan	: Jumlah Dana Rp. 29.391.700,-		
	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Pada Tahun 2022.		
	Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.	49,000,000
	Capaian Program	: Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Target Kinerja 75 %		
	Masukan	: Jumlah Dana Rp. 89.201.200,-		
	Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang terpelihara Pada Tahun 2022.		
	Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Singajaya		
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Rp.</b>	<b>126,600,000</b>
<b>1.</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan</b>		<b>Rp.</b>	<b>91,600,000</b>

### di Tingkat Kecamatan

- 1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp. **91,600,000**
- Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 82 %
- Masukan : Jumlah Dana Rp **91,600,000,-**
- Keluaran : Jumlah Monitoring Program Bansos (BPNT, PKH, dll), Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (MTQ), Fasilitasi Kegiatan Olah Raga (Porkab), Pada Tahun 2022.
- Hasil : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya
- 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rp. 35,000,000**
- 2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp. **35,000,000**
- Capaian Program : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 82 %
- Masukan : Jumlah Dana Rp. **35,000,000,-**
- Keluaran : Jumlah jenis pelayanan Pada Tahun 2022.
- Hasil : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya
- III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rp. 34,000,000**
1. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp. 24,000,000**

1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp	12.000.000
	Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100 %		
	Masukan : Jumlah Dana Rp. 12.000.000,-		
	Keluaran : Peningkatan ingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Des Pada Tahun 2022.		
	Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		
	Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya		
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	12.000.000
	Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100 %		
	Masukan : Jumlah Dana Rp. 12.000.000,-		
	Keluaran : Jumlah Monev pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Pada Tahun 2022.		
	Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		
	Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya		
<b>2.</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>10,000,000</b>
2.1.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	<b>10,000,000</b>
	Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100 %		
	Masukan : Jumlah Dana Rp. <b>10,000,000,-</b>		
	Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pada Tahun		

2022.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja  
Kecamatan

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya

**IV PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** Rp. 210,200,000

**1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** Rp. 9,400,000

1.1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp. 9,400,000

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Dengan Target Kinerja 80 %

Masukan : Jumlah Dana Rp. **9,400,000,-**

Keluaran : Jumlah Patroli dalam rangka Penegakan perda/Perkada Pada Tahun 2022.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya

**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** Rp. 200,800,000

2

1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp. 150,800,000

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Dengan Target Kinerja 80 %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 150,800,000,-

Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI/POLRI Pada Tahun 2022.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya

1.2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp.	50.000.000
Capaian Program	:	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 80 %
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 50.000.000,-
Keluaran	:	Jumlah Kegiatan koordinasi dengan Tomas dan Toma Pada Tahun 2022.
Hasil	:	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Singajaya

**V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **Rp. 165,000,000**

**1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** **Rp. 165,000,000**

1.1	Rp.	15,000,000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 90 %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.000.000,-

Keluaran : Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pada Tahun 2022.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya

1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp.	50,000,000
	Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 90 %  Masukan : Jumlah Dana Rp. 50,000,000,- Keluaran : Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pada Tahun 2022.  Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan  Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya		
1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.	100,000,000
	Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 90 %  Masukan : Jumlah Dana Rp. 100,000,000,- Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimcam Pada Tahun 2022.  Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan  Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya		
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Rp.</b>	<b>36,060,000</b>
1.	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rp.</b>	<b>36,060,000</b>
1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp.	4,060,000
	Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 85 %		

Masukan : Jumlah Dana Rp. 4,060,000

Keluaran : Jumlah Perdes/Perkades yang difasilitasi penyusunannya Pada Tahun 2022.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya

1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rp. 19,000,000

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 85 %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 19,000,000.-

Keluaran : Jumlah kegiatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa ( Lomba Desa ) Pada Tahun 2022.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya

1.3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Rp. 13,000,000

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 85 %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 13,000,000.-

Keluaran : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kec Pada Tahun 2022.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Singajaya

**JUMLAH ANGGARAN Rp. 2.521.764.574**

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Singajaya. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

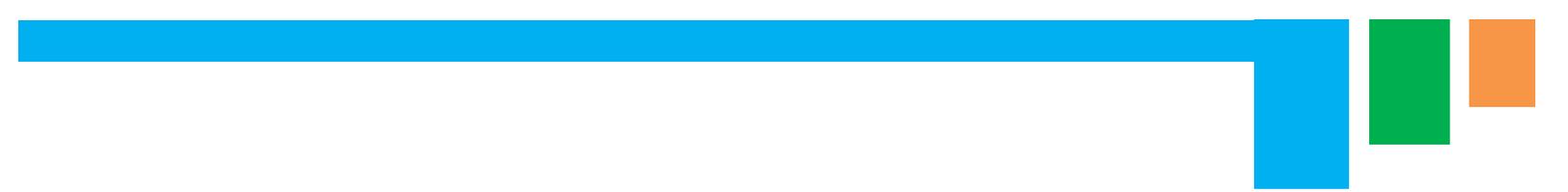
## BAB V P E N U T U P

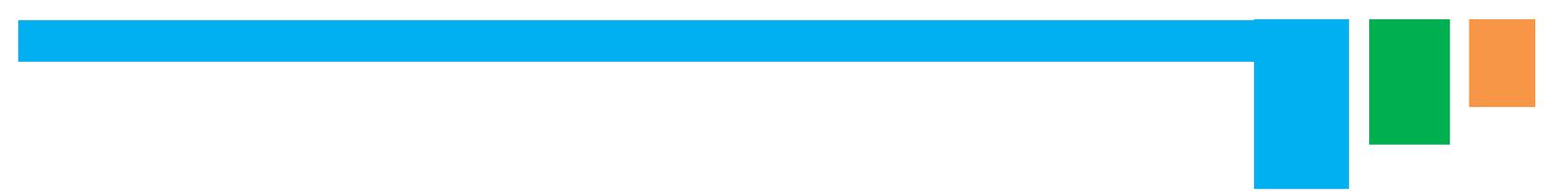
**P**ada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Singajaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut melalui Rencana Kerja Kecamatan Singajaya

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Singajaya. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Singajaya ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;



- 
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
  5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi “ **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera**”.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**